

 <p>BIRO PENGADAAN BARANG/ JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</p>	NOMOR SOP	:J00.3/0619/BPLPSE/B.PBJ
	TGL PEMBUATAN	: 28 FEBRUARI 2023
	TGL REVISI	:
	TGL PENGESAHAN	:
	DISAHAKAN OLEH	KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA  Buyung Dedi Gunawan, S.T., M.M. NIP. 19720528 200502 1 001
	NAMA SOP	REGISTRASI ADMIN PPE
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 3. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 4. PermenPan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala LPSE 2. Program Manager Direktorat e-Procurement LKPP 	
PENJELASAN SINGKAT:	PERALATAN/ PERLENGKAPAN:	
Prosedur ini mencakup proses pemohonan pembuatan akun oleh Kepala LPSE kepada PM Direktorat e-Procurement LKPP dan pembuatan akun oleh PM Direktorat e-Procurement LKPP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan/SK Pembentukan dan Penunjukan Personil LPSE 2. Data Profile LPSE 3. Data Personil Admin PPE 4. KTP Admin PPE 	
TUJUAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi Kepala LPSE dalam melakukan permohonan pembuatan akun Admin PPE kepada PM Direktorat e-Procurement LKPP		
PERINGATAN:	DEFINISI:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala LPSE adalah orang yang mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE. 2. Program Manager yang selanjutnya disebut PM adalah Tim yang terdiri dari personil pada Direktorat E-Procurement yang menjalankan tugas dan fungsi Seksi Penyiapan Kebijakan E-Procurement pada Sub Direktorat Pengembangan E-Procurement Direktorat e-Procurement LKPP 	
KETERKAITAN:		

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REGISTRASI ADMIN PPE
PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SELAKU UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)**

No.	Aktivitas	Pelaksana	PM Direktorat e-Procurement LKPP	Persyaratan/ Kelengkapan	Mutu Baku	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyampaikan berkas permohonan pembuatan akun (user id, password) kepada Program Manager Direktorat e-Procurement LKPP	Kepala LPSE Mulai []		1. Surat Keputusan/SK Pembentukan dan Penunjukan Personil LPSE 2. Data Profile LPSE 3. Data Personil Admin PPE 4. KTP Admin PPE	N/A			Berkas dapat disampaikan secara (hardcopy) langsung dan melalui email (softcopy)
2	Menerima dan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas, Apakah berkas lengkap?				Berkas permohonan	10 Menit	Hasil pemeriksaan berkas	
3	Meminta kelengkapan berkas kepada Kepala LPSE					5 Menit		
4	Melengkapi kekurangan berkas permohonan					N/A		
5	Membuat Akun Admin PPE pada aplikasi SPSE			▪ Tata cara pembuatan akun pada aplikasi SPSE mengacu pada panduan pengguna (user guide) aplikasi SPSE		30 Menit		
6	Menginformasikan melalui e-mail akun (user id dan password) admin PPE yang telah dibuat kepada Kepala LPSE			▪ Dalam email diinformasikan untuk segera melakukan login dengan user id dan password tersebut serta mewajibkan untuk melakukan perubahan password	10 Menit		Email informasi akun Admin PPE	
7	Memberitahukan user id dan password kepada admin PPE			▪ Hasil pembuatan akun	5 Menit		Informasi akun sampai kepada LPSE	
8	Pengarsipan Dokumen			▪ Selesai []	Hasil pembuatan akun	10 Menit	Arsip dokumen	